

### A. PENJELASAN UMUM

#### A.1. Profil dan Kebijakan Teknis Satuan Kerja Loka Riset Perikanan Tuna

*Dasar Hukum Entitas dan Rencana Strategis*

Loka Riset Perikanan Tuna (LRPT) yang sebelumnya bernama Stasiun Monitoring Perikanan Tuna (SMPT) Benoa awalnya merupakan sebuah proyek kerjasama dimana inisiasi pertama pada tahun 1992 bekerjasama dengan Commonwealth Scientific and Industrial Research Organisation (CSIRO) Australia yang dilatarbelakangi oleh meningkatnya tekanan aktivitas perikanan terhadap fishing ground tuna sirip biru selatan. Kerjasama berlanjut pada tahun 2002 dengan Indian Ocean Tuna Commission (IOTC) dan Overseas Fishery Cooperation Foundation (OFCF) Jepang yang bertujuan untuk mencatat dan memonitoring tuna yang didaratkan di Benoa sebagai salah satu tempat pendaratan utama selain Cilacap dan Muara Baru. Pada perkembangannya komoditas yang dicatat juga mencakup tuna-like species seperti marlin (billfish) dan hasil tangkap sampingan (by-catch).

Pada tahun 2005 trial observer program dilaksanakan atas kerjasama Australian Centre for Agricultural Research (ACIAR) dan CSIRO dan berakhir tahun 2009. Pada tahun 2009 SMPT Benoa berdiri yang terintegrasi dengan Pusat Penelitian Pengelolaan Perikanan dan Konservasi Sumberdaya Ikan (P4KSI) dan tahun 2010 di bawah tanggung jawab Balai Penelitian Perikanan Laut (BPPL). kemudian pada tahun 2011 berdiri sendiri menjadi Unit Pelaksana Teknis (UPT) mandiri di bawah Badan Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan (Balitbang KP) sesuai dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor: PER.27/MEN/2010. Pada tanggal 8 Maret 2011. operasional perkantoran LPPT secara resmi dibuka oleh Kepala Balitbang KP. Pada tahun 2017. terdapat perubahan nomenklatur Loka Penelitian Perikanan Tuna (LPPT) menjadi Loka Riset Perikanan Tuna (LRPT) hal ini sesuai dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor: 16/Permen-KP/2017 tentang organisasi dan tata kerja LRPT tanggal 27 Mei 2017.

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 16/PERMEN-KP/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Loka Riset Perikanan Tuna. merupakan Unit Pelaksana Teknis Kementerian Kelautan dan Perikanan di bidang riset sumber daya perikanan tuna dan

sejenisnya (tuna like species). yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan yang menangani riset kelautan dan perikanan serta pengembangan sumberdaya manusia kelautan dan perikanan. Loka Riset Perikanan Tuna mempunyai tugas melaksanakan kegiatan riset sumber Daya perikanan tuna dan sejenisnya (tuna like species) di wilayah Republik Indonesia di perairan Samudera Hindia.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud. Loka Riset Perikanan Tuna menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan rencana program dan anggaran. pemantauan. evaluasi.dan laporan;
- b. pelaksanaan kegiatan riset sumberdaya perikanan tuna dan sejenisnya (tuna like species) di wilayah Republik Indonesia di perairan Samudera Hindia yang meliputi aspek biologi. lingkungan. dinamika populasi dan eksploitasi;
- c. pelayanan teknis. jasa. informasi. komunikasi.dan kerjasama riset;
- d. pengelolaan prasarana dan sarana riset; dan
- e. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga.

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi tersebut. Loka Riset Perikanan Tuna dipimpin oleh seorang Kepala. dengan struktur organisasi Loka Riset Perikanan Tuna terdiri dari:

- Urusan Umum : mempunyai tugas melakukan penyusunan. pemantauan. dan evaluasi rencana. program. dan anggaran. pelaporan. urusan keuangan. hubungan masyarakat. organisasi dan tata laksana. kepegawaian. persuratan. kearsipan. dokumentasi. rumah tangga. serta pengelolaan barang milik negara dan perlengkapan.
- Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan tugas memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Loka Riset Perikanan Tuna sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan. Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud ditetapkan Koordinator Pelaksana Fungsi Pelayanan Fungsional sesuai dengan ruang lingkup bidang tugas dan fungsi Loka Riset Perikanan Tuna. Koordinator Pelaksana Fungsi Pelayanan Fungsional mempunyai tugas mengoordinasikan dan mengelola kegiatan pelayanan masing-

masing fungsional sesuai dengan bidang tugas Loka Riset Perikanan Tuna.

Adapun struktur organisasi dan pejabat struktural yang duduk dalam organisasi Loka Riset Perikanan Tuna terlihat pada Bagan Struktur Organisasi Loka Riset Perikanan Tuna sebagai berikut:



Struktur Organisasi Loka Riset Perikanan Tuna

#### **Visi dan Misi Loka Riset Perikanan Tuna:**

Loka Riset Perikanan Tuna mempunyai visi “Menjadi Institusi Utama Penyedia Data dan Informasi Perikanan Tuna dan sejenisnya (*tuna like species*) di wilayah Negara Republik Indonesia di perairan Samudera Hindia”

Pada Tahun 2025, LRPT memiliki tanggung jawab untuk mewujudkan 3 Sasaran Strategis dan 10 Indikator Kinerja Utama. Pengukuran capaian kinerja LRPT Tahun 2025 dilakukan dengan cara membandingkan antara target (rencana) dan realisasi indikator kinerja utama (*key performance indicator/KPI*) pada masing-masing perspektif. Pencatatan dan

pengukuran kinerja dilakukan dengan bantuan perangkat lunak berbasis *balanced scorecard* dari Kementerian Kelautan Perikanan. yaitu pada <http://kinerjaku.kkp.go.id>.

Sebagai langkah konkret untuk mewujudkan visi tersebut. telah ditetapkan misi Loka Riset Perikanan Tuna Benua yang dirumuskan sebagai berikut:

1) Menyediakan data dan informasi terkini hasil penelitian perikanan tuna.

Mengembangkan profesionalisme kelembagaan dan sumberdaya penelitian perikanan tuna

### **1.1. Keragaan SDM (Kekuatan SDM)**

Pada Tahun 2025 Loka Riset Perikanan Tuna mempunyai total pegawai sebanyak 9 orang PNS dan 6 orang PPPK. Sehingga total jumlah pegawai ASN LRPT baik PNS maupun PPPK pada Tahun 2025 menjadi 15 orang. Komposisi pegawai di Loka Riset Perikanan Tuna adalah sebagai berikut.

- Jumlah pegawai berdasarkan golongan  
Komposisi jumlah PNS LRPT berdasarkan golongan/ruang per Tahun 2025 terdiri atas Golongan IV sebanyak 1 orang III sebanyak 7 orang dan Golongan II sebanyak 1 orang. Adapun untuk PPPK terdiri dari 4 orang golongan IX. 1 orang golongan VII. dan 1 orang golongan V.
- Jumlah pegawai berdasarkan jenjang pendidikan  
Jumlah ASN LRPT Tahun 2025 berdasarkan tingkat pendidikan terdiri dari jenjang S2 sebanyak 2 orang. S1 sebanyak 10 orang. D3 sebanyak 2 orang dan SMA/SMK sebanyak 1 orang.
- Jumlah pegawai berdasarkan Jabatan Fungsional  
Komposisi jumlah PNS LRPT Semester I 2025 berdasarkan jabatan fungsionalnya terdiri atas jabatan fungsional sebanyak 5 orang. fungsional umum/pelaksana sebanyak 9 orang dan struktural sebanyak 1 orang.

## **A.2. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan**

### ***Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan***

Laporan Keuangan Tahun 2025 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Satuan Kerja Loka Riset Perikanan Tuna. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

SAI disusun berdasarkan penginputan melalui aplikasi SAKTI beserta monitoringnya pada MONSAKTI. SAI dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Sedangkan SIMAK-BMN adalah sistem yang menghasilkan informasi aset tetap, persediaan, dan aset lainnya untuk penyusunan neraca dan laporan barang milik negara serta laporan manajerial lainnya.

## **A.3. Basis Akuntansi**

### ***Basis Akuntansi***

Satuan Kerja Loka Riset Perikanan Tuna menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

## **A.4. Dasar Pengukuran**

### ***Dasar Pengukuran***

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Satuan Kerja Loka Riset Perikanan Tuna dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing ditranslasi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

#### **A.5. Kebijakan Akuntansi**

##### ***Kebijakan Akuntansi***

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun 2025 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan yang merupakan entitas pelaporan dari Satuan Kerja Loka Riset Perikanan Tuna. Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Satuan Kerja Loka Riset Perikanan Tuna adalah sebagai berikut:

##### **(1) Pendapatan- LRA**

##### ***Pendapatan -LRA***

- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netto nya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

## **(2) Pendapatan- LO**

### **Pendapatan -LO**

- Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan /atau Pendapatan direalisasi. yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Secara khusus pengakuan pendapatan-LO pada Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan adalah sebagai berikut:
  - Pendapatan Jasa Pelatihan diakui setelah pelatihan selesai dilaksanakan
  - Pendapatan Sewa Gedung diakui secara proporsional antara nilai dan periode waktu sewa.
  - Pendapatan Denda diakui pada saat dikeluarkannya surat keputusan denda atau dokumen lain yang dipersamakan
- Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto. yaitu dengan membukukan penerimaan bruto. dan tidak mencatat jumlah netto nya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

## **(3) Belanja**

### **Belanja**

- Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran. pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

## **(4) Beban**

### **Beban**

- Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas. yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.

- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

## (5) Aset

### Aset

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

### a. Aset Lancar

#### Aset Lancar

- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.
- Investasi Jangka Pendek BLU dalam bentuk surat berharga disajikan sebesar nilai perolehan sedangkan investasi dalam bentuk deposito dicatat sebesar nilai nominal.
- Piutang diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
  - a) Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
  - b) Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal
- Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut:

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0.5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	1. Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan	100%
	2. Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	

- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Perbedaharaan/Ganti Rugi (TP/TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TP/TGR atau Bagian Lancar TPA.
- Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:
  - harga pembelian terakhir. apabila diperoleh dengan pembelian;
  - harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
  - harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

#### **b. Aset Tetap**

##### *Aset Tetap*

- Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun.
- Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:
  - a) Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

- b) Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
  - c) Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas. diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah. jalan/irigasi/jaringan. dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.
- Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus. ketinggalan jaman. tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang. rusak berat. tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR). atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-Lain pada pos Aset Lainnya.
  - Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya. dikeluarkan dari neraca pada saat ada usulan penghapusan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN/BMD.

#### **c. Penyusutan Aset Tetap**

##### *Penyusutan Aset Tetap*

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap.
- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
  - a. Tanah
  - b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP)
  - c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan
- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman

Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

*Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap*

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 tahun
Jalan, Jaringan dan Irigasi	5 s.d. 40 tahun
Aset Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)	4 tahun

*Piutang  
Jangka  
Panjang*

**d. Piutang Jangka Panjang**

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan/dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan.

*Aset  
Lainnya*

**e. Aset Lainnya**

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.
- Aset Tak Berwujud (ATB) disajikan sebesar nilai tercatat neto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.
- Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.
- Masa Manfaat Aset Tak Berwujud ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 620/KM.6/2015 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas

Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

*Penggolongan Masa Manfaat Aset Tak Berwujud*

Kelompok Aset Tak Berwujud	Masa Manfaat (tahun)
Software Komputer	4
Franchise	5
Lisensi. Hak Paten Sederhana. Merk. Desain Industri. Rahasia Dagang. Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.	10
Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran. Paten Biasa. Perlindungan Varietas Tanaman Semusim.	20
Hak Cipta Karya Seni Terapan. Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan	25
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.II. Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan. Hak Ekonomi Produser Fonogram.	50
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.I	70

- Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah disajikan sebesar nilai buku yaitu harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

**(6) Kewajiban**

*Kewajiban*

- Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.
  - a. Kewajiban Jangka Pendek  
Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.  
Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga. Belanja yang Masih Harus Dibayar. Pendapatan Diterima di Muka. Bagian Lancar Utang Jangka Panjang. dan Utang Jangka Pendek Lainnya.
  - b. Kewajiban Jangka Panjang  
Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu

lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

- Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal. yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

#### **(7) Ekuitas**

#### ***Ekuitas***

Ekuitas merupakan merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas

## B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Selama periode berjalan, Kantor Loka Riset Perikanan Tuna terdapat enam kali revisi yang terdiri dari empat revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dari DIPA awal dan dua kali revisi POK Satker. Berdasarkan sumber pendapatan dan jenis belanja adalah sebagai berikut:

Uraian	TA 2025	
	ANGGARAN AWAL	ANGGARAN SETELAH DIREVISI
<b>Pendapatan</b>		
Pendapatan PNB	0	0
<b>Jumlah Pendapatan</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Belanja</b>		
Belanja Pegawai	1.777.647.000	1,577,647,000
Belanja Barang	3.920.000.000	2,250,069,000
Belanja Modal	7.000.000.000	0
Belanja Bantuan Sosial	0	0
<b>Jumlah Belanja</b>	<b>12.697.647.000</b>	<b>3,827,716,000</b>

Pada periode 31 Desember 2025 LRPT melaksanakan 5 (Lima) kali revisi DIPA. Terdiri dari 7 (tujuh) kali Revisi DIPA Petikan dengan rincian Revisi DIPA kewenangan DJA terkait Efisiensi Anggaran pada Belanja 52 Operasional (002) dan Non Operasional (Dukman) serta Belanja Modal (53), Revisi DIPA kewenangan DJA terkait Relaksasi Anggaran buka blokir pada Belanja 52 Operasional (002) di Kegiatan Langganan Daya dan Jasa (Listrik, Air, Telp dan Internet), Revisi Kanwil DJPB Terkait Pemutakhiran Hal III DIPA Triwulan II, Revisi Kanwil DJPB Terkait Pemutakhiran Hal III DIPA Triwulan III, Revisi DJA Terkait Hapus Pagu Blokir sebesar Rp8.669.931.000,00, Revisi Kanwil DJPB Terkait Pemutakhiran Hal III DIPA Triwulan IV dan revisi POK terkait Optimalisasi Anggaran 002 dan Alokasi anggaran 001 untuk PPPK, Revisi DJA terkait pengalihan kelebihan/sisa Pagu Belanja Pegawai sebesar Rp200.000.000,00. Adapun revisi POK satker sebanyak 3 (tiga) kali dengan rincian Revisi POK Kewenangan KPA pada Belanja Operasional Perkantoran (002) penyesuaian Belanja honor PPNPN dan Outsourcing sesuai dengan UMR di Denpasar tahun 2025, Revisi POK pada Belanja Operasional Perkantoran (002), dan Revisi DIPA Kewenangan KPA terkait pemenuhan kekurangan tukin PPPK dan Optimalisasi Belanja Operasional 002.

Tabel . Revisi Dipa Petikan Satuan Kerja Loka Riset Perikanan Tuna Tahun Anggaran 2025

No	Uraian	Tanggal DIPA	Total PAGU (Rp)	Total Blokir (Rp)	Kode Digital Stamp	Kategori Revisi	Keterangan Revisi
1	DIPA Petikan AWAL (403826)	SP DIPA-032.12.2.40 3826/2025 2 Desember 2024	12.697.647	-	DS:1591-3035-9540-6962	-	DIPA BASELINE 2024
2	POK SATKER-1	30 Desember 2024	12.697.647	-	-	-	Revisi POK Kewenangan KPA pada Belanja Operasional Perkantoran (002) penyesuaian Belanja honor PPNPN dan Outsourcing sesuai dengan UMR di Denpasar tahun 2025
3	DIPA Petikan Rev 01 (403826)	SP DIPA-032.12.2.40 3826/20252 Desember 2024, Tanggal Revisi : 21 Februari 2025	12.697.647	9.157.131	DS:5100-0096-3800-3367	-	Revisi DIPA kewenangan DJA terkait Efisiensi Anggaran pada Belanja 52 Operasional (002) dan Non Operasional (Dukman) serta Belanja Modal (53)
4	DIPA Petikan Rev 02 (403826)	SP DIPA-032.12.2.40 3826/20252 Desember 2024, Tanggal Revisi : 9 April 2025	12.697.647	8.669.931	DS:0658-0732-0495-4306	-	Revisi DIPA kewenangan DJA terkait Relaksasi Anggaran buka blokir pada Belanja 52 Operasional (002) di Kegiatan Langganan Daya dan Jasa (Listrik, Air, Telp dan Internet)
5	DIPA Petikan Rev 03 (403826)	SP DIPA-032.12.2.40 3826/20252 Desember 2024, Tanggal Revisi : 16 April 2025	12.697.647	8.669.931	DS:0658-0732-0495-4306	-	Revisi Kanwil Terkait Pemutakhiran Hal III DIPA Triwulan II
6	POK SATKER-2	15 Mei 2025	12.697.647	130.315	-	-	Revisi POK pada Belanja Operasional Perkantoran (002)
7	DIPA Petikan Rev 04 (403826)	SP DIPA-032.12.2.40 3826/20252 Desember 2024, Tanggal Revisi : 3 Juli 2025	12.697.647	8.669.931	DS:0658-0732-0495-4306	-	Revisi Kanwil Terkait Pemutakhiran Hal III DIPA Triwulan III
8	DIPA Petikan Rev 05 (403826)	SP DIPA-032.12.2.40 3826/20252 Desember 2024, Tanggal Revisi : 1 September 2025	4.027.716	-	DS:5230-6484-6036-3881	-	Revisi DJA Terkait Hapus Pagu Blokir sebesar Rp. 8.669.931.000,-
9	DIPA Petikan Rev 06 (403826)	SP DIPA-032.12.2.40 3826/20252 Desember 2024, Tanggal Revisi :	4.027.716	-	DS:5230-6484-6036-3881	-	Revisi Kanwil Terkait Pemutakhiran Hal III DIPA Triwulan IV dan revisi POK terkait Optimalisasi Anggaran 002 dan Alokasi anggaran 001

		2 Oktober 2025					untuk PPPK
10	DIPA Petikan Rev 07 (403826)	SP DIPA-032.12.2.40 3826/20252 Desember 2024, Tanggal Revisi : 19 November 2025	3.827.716	-	DS:4236-5666-5009-0308	-	Revisi DJA terkait pengalihan kelebihan/sisa Pagu Belanja Pegawai sebesar Rp. 200.000.000,-
11	DIPA Petikan Revisi POK 3 (403826)	SP DIPA-032.12.2.40 3826/20252 Desember 2024, Tanggal Revisi : 11 Desember 2025	3.827.716	-	DS:4236-5666-5009-0308	-	Revisi DIPA Kewenangan KPA terkait pemenuhan kekurangan tukin PPPK dan Optimalisasi Belanja Operasional 002

## B.1 Pendapatan

*Realisasi  
Pendapatan  
Rp7.160.000,00*

Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp7.160.000,00. Pendapatan tersebut bersumber dari Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin senilai Rp6.200.000,00 dan Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan senilai Rp960.000,00.

### Perbandingan Realisasi Pendapatan 31 Desember 2025 dan 2024

Uraian	TA 2025	TA 2024	% Naik (Turun)
<b>Pendapatan</b>			
Pendapatan PNBPN	7.160.000	78.364.505	-90,86
<b>Jumlah</b>	<b>7.160.000</b>	<b>78.364.505</b>	<b>-90,86</b>

### Rincian Pendapatan 31 Desember 2025 Satker Loka Riset Perikanan Tuna

N O	AKUN	KODE BILLING	NTB	NTPN	NILAI	KETERANGAN
1	425131	820250421 107320	697617 314266	5816E6U8F7 O6F6JO	240.000	Sewa guest house an. Prima Dina Indria
2	425131	820250526 181933	905975 267090	109136U8F7 RALQHD	160.000	Sewa Guest House an. Todhi Pristiano
3	425131	820250825 885998	842747 571273	7BFB92G503 8AF29E	160.000	Sewa Guest House an. Diantiny Mariam Pribadi (2 malam)
4	425131	820250904 517027	459690 789210	74D6B61QV DK72MD3	160.000	Sewa guest house an. Frida Sidik ( 2 malam)
5	425131	820250904 517582	485699 768977	D5CB061QV DK72MUE	160.000	Sewa guest house an. Nuryani Widagti
6	425131	820250825 884140	807108 550734	350590NA0E 3HLOFC	80.000	Sewa guest house
7	425122	820251016 561369	777284 029362	B71F08N3ET EN50MP	6.200.000	Hasil Bersih Lelang RL 0521/14.01/2025-01 Kode Lot JMWWH2 Loka Riset Perikanan Tuna (Alsin sejumlah 53 buah)

## B.2 Belanja

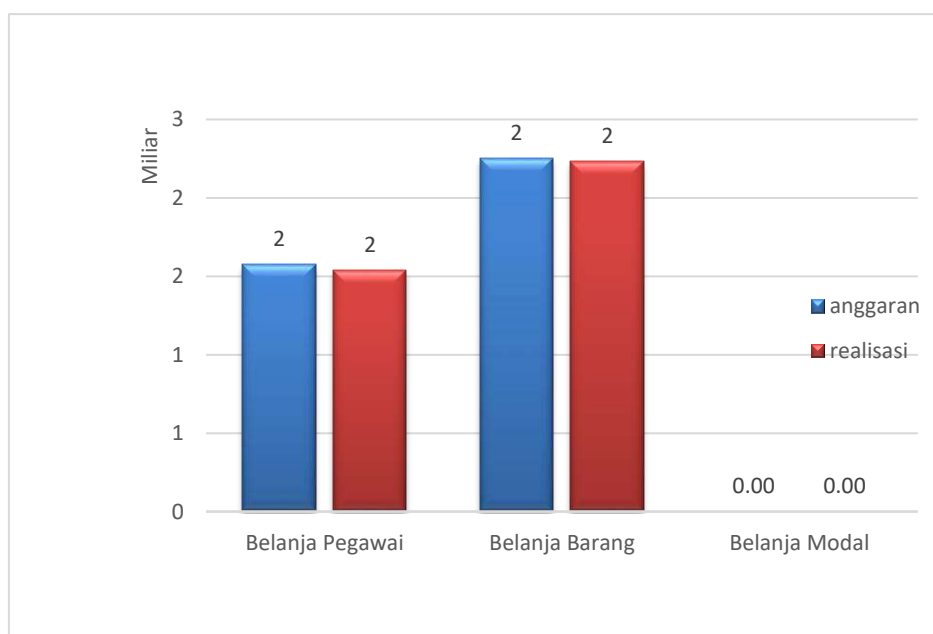
Realisasi  
Belanja  
Negara Rp  
3.769.939.6  
45,00

Realisasi Belanja instansi pada periode 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp3.769.939.645,00 atau 98,49% dari anggaran belanja sebesar Rp3.827.716.000,00. Terdiri dari belanja pegawai senilai Rp1.537.083.559,00 dan belanja barang senilai Rp2.232.856.086,00. Rincian anggaran dan realisasi belanja periode 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut:

*Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja 31 Desember 2025*

Uraian	TA 2025		
	Anggaran	Realisasi	% Real Anggaran
Belanja Pegawai	1,577,647,000	1,537,083,559	97
Belanja Barang	2,250,069,000	2,232,856,086	99
Belanja Modal	0	0	0
<b>Total Belanja Kotor</b>	<b>3,827,716,000</b>	<b>3,769,939,645</b>	<b>98</b>
Pengembalian			
<b>Jumlah</b>	<b>3,827,716,000</b>	<b>3,769,939,645</b>	<b>98</b>

Komposisi anggaran dan realisasi belanja dapat dilihat dalam grafik berikut ini:



Dibandingkan dengan periode 2024, Realisasi Belanja sampai dengan periode 31 Desember 2025 mengalami penurunan sebesar 49,4 persen. Penurunan disebabkan tidak adanya belanja modal pada tahun 2025.

*Perbandingan Realisasi Belanja 31 Desember 2025 dan 2023*

<b>Uraian</b>	<b>TA 2025</b>	<b>TA 2024</b>	<b>% Naik (Turun)</b>
Belanja Pegawai	1.577.647.000	1.533.991.289,	2,8
Belanja Barang	2.250.069.000	2.953.232.534,	-23,8
Belanja Modal	0	3.070.576.530,	-100,0
Belanja Bantuan Sosial			
<b>Jumlah</b>	<b>3.827.716.000</b>	<b>7.557.800.353</b>	<b>-49,4</b>

**B.3 Belanja Pegawai**

*Belanja Pegawai Rp 1.537.083.559,00*

Realisasi Belanja Pegawai periode 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing senilai Rp1.537.083.559,00 dan Rp1.533.991.289,00. Realisasi belanja pegawai Rp1.537.083.559,00 atau 97% dari pagu anggaran Rp1.577.647.000,00. Sisa pagu senilai Rp43.655.711,00 diakibatkan adanya perbedaan jumlah pajak TER (Tarif Efektif Rata-rata) pada tunjangan kinerja PNS dari tahun sebelumnya. Belanja Pegawai adalah belanja atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

*Perbandingan Belanja Pegawai 31 Desember 2025 dan 2024*

<b>Uraian</b>	<b>TA 2025</b>	<b>TA 2024</b>	<b>% Naik (Turun)</b>
Belanja Gaji dan Tunjangan PNS	675.832.598	746.740.110	-9,5
Belanja Gaji dan Tunjangan PPPK	129.467.173	60.853.062	112,8
Belanja Gaji dan Tunjangan TNI/POLRI	-	-	
Belanja Gaji dan Tunjangan Pejabat Negara	-	-	
Belanja Lembur	-	-	
Belanja Tunj. Khusus & Belanja Pegawai Transito	731.783.918	726.407.947	0,7
<b>Jumlah Belanja Kotor</b>	<b>1.537.083.689</b>	<b>1.533,991,289</b>	<b>0,2</b>
Pengembalian Belanja Pembulatan Gaji	130	0	
<b>Jumlah Belanja</b>	<b>1.537.083.559</b>	<b>1.533,991,289</b>	<b>0,2</b>

#### B.4 Belanja Barang

Belanja  
Barang Rp  
2.232.856.0  
86,00

Realisasi Belanja Barang periode 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp2.232.856.086,00 dan Rp2.953.232.534,00. Realisasi Belanja Barang periode 31 Desember 2025 mengalami penurunan sebesar 24,4 persen dari Realisasi Belanja Barang 31 Desember 2024. Hal ini disebabkan karena kegiatan riset dan operasional perkantoran sudah dapat dilaksanakan pada awal periode anggaran.

##### Perbandingan Belanja Barang 31 Desember 2025 dan 2024

Uraian	TA 2025	TA 2024	% Naik (Turun)
Belanja Barang Operasional	423.532.822	1.033.644.031	-59,0
Belanja Barang Non Operasional	20.012.650	19.183.483	4,3
Belanja Barang Persediaan	6.863.000	47.946.000	-85,7
Belanja Jasa	763.564.608	444.536.927	71,8
Belanja Pemeliharaan	987.437.392	1.258.819.906	-21,6
Belanja Perjalanan Dalam Negeri	31.445.614	149.102.187	-78,9
Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat / Pemda	-	-	
Belanja Barang Lainnya untuk Diserahkan kepada Masyarakat / Pemda	-	-	
<b>Jumlah Belanja Kotor</b>	<b>2.232.856.086</b>	<b>2.953.232.534</b>	<b>-24,4</b>
Pengembalian Belanja	0	0	
<b>Jumlah Belanja</b>	<b>2.232.856.086</b>	<b>2.953.232.534</b>	<b>-24,4</b>

### **B.5 Belanja Modal**

*Belanja  
Modal Rp0*

Realisasi Belanja Modal periode 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp3.070.576.530,00. Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Pada tahun anggaran 2025 Loka Riset Perikanan Tuna alokasi anggaran untuk belanja modal telah dihapuskan.

#### *Perbandingan Belanja Modal 31 Desember 2025 dan 2024*

<b>Uraian</b>	<b>TA 2025</b>	<b>TA 2024</b>	<b>% Naik (Turun)</b>
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0	1.492.151.530	(100)
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0	1.578.425.000	(100)
<b>Jumlah Belanja Kotor</b>	<b>0</b>	<b>3,070,576,530</b>	<b>(100)</b>
Pengembalian Belanja	0	0	
<b>Jumlah Belanja</b>	<b>0</b>	<b>3,070,576,530</b>	<b>(100)</b>

## C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

### C.1 Kas di Bendahara Pengeluaran

*Kas di Bendahara  
Pengeluaran  
Rp0,00*

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran periode 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran adalah sebagai berikut:

*Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran 31 Desember 2025 dan 2024*

KETERANGAN	TA 2025	TA 2024
Uang Tunai	0	0
Uang Yang Belum Di GU	0	0
Uang Di Rekening Bank (BNI)	0	0
Selisih kas	0	0
<b>JUMLAH</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### C.2 Kas Lainnya dan Setara Kas

*Kas Lainnya dan  
Setara Kas  
Rp0,00*

Nilai Kas Lainnya dan Setara Kas per 31 Desember 2025 dan 2024 dan masing-masing adalah senilai Rp0,00 dan Rp0,00.

### C.3 Persediaan

*Persediaan  
Rp20.420.880,00*

Nilai Persediaan per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing adalah sebesar Rp20.420.880,00 dan Rp22.208.956,00. Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan/atau untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Adapun pada Satker Loka Riset Perikanan Tuna barang persediaan terbagi menjadi tiga kelompok bidang yaitu Barang Konsumsi dalam bentuk alat tulis, buku tulis, odner, map, staples, isi staples, tinta printer, mouse dan lainnya, sedangkan baarang persediaan suku cadang dalam bentuk suku cadang alat laboratorium dan barang konsumsi bahan baku dalam bentuk bahan kimia cair dan padat. Rincian Persediaan per 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut:

*Rincian Persediaan Per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024*

JENIS	TA 2025	TA 2024
Barang Konsumsi	20.420.880	22.208.956
Suku Cadang	0	0
Bahan Baku	0	0
<b>JUMLAH</b>	<b>20.420.880</b>	<b>22.208.956</b>

Semua jenis persediaan pada tanggal pelaporan berada dalam kondisi baik.

#### C.4 Tanah

Tanah  
Rp13.175.070.000,0  
0

Nilai aset tetap berupa tanah yang dimiliki Satuan Kerja Loka Riset Perikanan Tuna per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp13.175.070.000,00 dan Rp13.175.070.000,00. Satuan Kerja Loka Riset Perikanan Tuna memiliki tanah yang terletak di Jalan Mertasari No. 140, Br. Suwung Kangin, Kel. Sidakarya, Kec. Denpasar Selatan – Bali sesuai dengan sertifikat hak pakai tanah nomor : 22.03.03.09.4.00063 seluas 1.900 m2 dan sertifikat hak pakai tanah nomor : 22.09.03.09.4.00064 seluas 149 m2.

##### Rincian Saldo Tanah per 31 Desember 2025 dan 2024

31 Desember 2025	30 Desember 2024	KENAIKAN / (PENURUNAN)
Rp13.175.070.000,00	Rp13.175.070.000,00	0
<b>Mutasi / perubahan tanah tsb adalah</b>		<b>0</b>

Tidak terdapat perubahan nilai aset tanah pada Satuan Kerja Loka Riset Perikanan Tuna pada periode 31 Desember 2025.

#### C.5 Peralatan dan Mesin

Peralatan dan  
Mesin  
Rp11.902.022.52  
0,00

Saldo aset tetap berupa Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah Rp11.902.022.520,00 dan Rp12.256.950.589,00. Sampai dengan periode 31 Desember terjadi mutasi kurang pada kelompok peralatan mesin senilai Rp354.928.069,00 dari penghapusan intrakompitabel senilai Rp226.338.972,00 sesuai Reklasifikasi dari Aset Tetap ke Aset Lainnya, tidak termasuk penghapusan ekstrakompitabel senilai Rp7.903.809,00. Berdasarkan Berita Acara Serah Terima Barang Milik Negara Loka Riset Perikanan Tuna Kepada PSDKP Bena, NOMOR B.337/LRPT/PL.450/IX/2025 terdapat transfer keluar senilai Rp128.589.097 berupa kursi besi / metal dan workstation. Mutasi nilai Peralatan dan Mesin tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2024	12.256.950.589
<b>Mutasi Tambah</b>	
Pembelian	0
Reklas Masuk	0
Transfer Masuk	
<b>Mutasi Kurang</b>	
Aset Tetap yg tdk digunakan	354.928.069
Transfer keluar	
<b>Saldo per 31 Desember 2025</b>	
Akumulasi Penyusutan s.d 31 Desember 2025	(10,139,907,907)
<b>Nilai Buku per 31 Desember 2025</b>	<b>11.902.022.520</b>

## C.6 Gedung dan Bangunan

*Gedung dan  
Bangunan  
Rp10.879.717.054,00*

Nilai Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah Rp10.879.717.054,00 dan Rp10.879.717.054,00. Mutasi transaksi terhadap Gedung dan Bangunan pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

<b>Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2024</b>	<b>10.879.717.054</b>
<b>Mutasi Tambah</b>	
Penambahan Nilai (kapitalisasi)	0
<b>Mutasi Kurang</b>	
Reklas Keluar	0
<b>Saldo per 31 Desember 2025</b>	
Akumulasi Penyusutan s.d 31 Desember 2025	(2,394,272,984)
<b>Nilai Buku per 31 Desember 2025</b>	<b>10.879.717.054</b>

## C.7 Jalan, Irigasi, dan Jaringan

*Jalan, Jaringan  
dan Irigasi  
Rp264.996.920,00*

Saldo Jalan, Irigasi, dan Jaringan Tidak terdapat perubahan nilai aset tanah pada Satuan Kerja Loka Riset Perikanan Tuna pada periode 30 September 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp264.996.920,00 dan Rp264.996.920,00. adapun sampai dengan periode 31 Desember 2025 tidak terjadi mutasi kurang dan mutasi tambah pada kelompok gedung dan bangunan. Mutasi transaksi terhadap Jalan, Irigasi, dan Jaringan pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

<b>Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2024</b>	<b>264.996.920</b>
<b>Mutasi Tambah</b>	
Penambahan Jaringan Teknologi Informasi	0
Reklas Masuk	0
<b>Mutasi Kurang</b>	
Reklas Keluar	0
<b>Saldo per 31 Desember 2025</b>	
Akumulasi Penyusutan s.d 31 Desember 2025	110,415,381
<b>Nilai Buku per 31 Desember 2025</b>	<b>264.996.920</b>

## C.8 Konstruksi Dalam Pengerjaan

*Konstruksi dalam  
pengerjaan  
Rp0,00*

Konstruksi dalam pengerjaan pada kegiatan belanja penambahan nilai gedung dan bangunan senilai Rp0,00.

## C.8 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Akumulasi  
Penyusutan Aset  
Tetap (Rp  
12.644.596.272,0  
0)

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing (Rp12.644.596.272,00) dan (Rp11.985.895.426,00). Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang disusutkan selama masa manfaat aset yang bersangkutan selain untuk Tanah dan Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP). Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut:

### Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2025

No	Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
1	Tanah	13.175.070.000	13.175.070.000	0
2	Gedung dan Bangunan	12.256.950.589	2.394.272.984	9.862.677.605
3	Peralatan dan Mesin	10.879.717.054	10.139.907.907	739.809.147
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	264.996.920	110.415.381	154.581.539
<b>Jumlah</b>		<b>36.576.734.563</b>	<b>(12.644.596.272)</b>	<b>49.221.330.835</b>

## C.9 Aset Lain-Lain

Aset Lain-Lain  
Rp0,00

Saldo Aset Lain-lain per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah senilai Rp0,00 dan Rp0,00. Aset Lain-lain merupakan Barang Milik Negara (BMN) yang berada dalam kondisi rusak berat dan tidak lagi digunakan dalam operasional entitas. Adapun mutasi aset lain-lain adalah sebagai berikut:

<b>Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2024</b>	<b>0</b>
<b>Mutasi Tambah</b>	-
Penghentian Aset	-
<b>Mutasi Kurang</b>	-
Penghapusan BMN	0
<b>Saldo per 31 Desember 2025</b>	<b>0</b>
Akumulasi Penyusutan s.d 31 Desember 2025	<b>0</b>
<b>Nilai Buku per 31 Desember 2025</b>	<b>0</b>

## C.10 Uang Muka dari KPPN

Uang Muka dari  
KPPN  
Rp0,00

Nilai Uang Muka dari KPPN per 31 Desember 2025 dan 2023 masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00.

### **C.12 Utang kepada Pihak Ketiga**

*Utang pihak ke-3  
Rp8.077.928,00*

Utang kepada Pihak Ketiga merupakan belanja yang masih harus dibayar dan merupakan kewajiban yang harus segera diselesaikan kepada pihak ketiga lainnya dalam waktu kurang dari 12 (dua belas bulan). Utang kepada pihak Ketiga senilai Rp8.077.928,00 pada periode Desember 2025 dan Rp21.944.694,00 untuk tahun 2024. Utang kepada pihak ketiga ini berupa Tagihan listrik bulan Desember senilai Rp7.800.646,00 Tagihan telepon bulan Desember senilai Rp106.782,00 dan Tagihan air bulan Desember senilai Rp170.500,00. Utang kepada pihak ketiga akan dibayarkan pada bulan Januari 2026.

### **C.13 Utang yang Belum Ditagihkan**

*Utang yang belum  
ditagihkan Rp0,00*

Utang yang belum ditagihkan per 31 Desember 2025 sebesar Rp0,00 dan 31 Desember 2024 sebesar Rp0,00. Utang Yang Belum Ditagihkan merupakan transaksi atas pengakuan utang karena adanya BAST dari pihak ketiga, berarti bahwa transaksi belanja yang telah diinput pada menu komitmen namun belum terbit SPBY pada periode penerbitan.

### **C.14 Ekuitas**

*Ekuitas  
Rp  
23.589.553.174,0  
0*

Ekuitas per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp Rp23.589.553.174,00 dan Rp24.613.048.093,00. Ekuitas adalah kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

## D.PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

### D.1 Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak

*Pendapatan PNPB  
Rp960.000,00*

Jumlah Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebesar Rp960.000 dan Rp75.064.505,00. Pendapatan tersebut bersumber dari Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan senilai Rp960.000,00.

#### *Rincian Pendapatan Negara Bukan Pajak 31 Desember 2025 dan 2024*

<b>Uraian</b>	<b>2025</b>	<b>2024</b>	<b>% Naik (Turun)</b>
<b>Pendapatan</b>			
Pendapatan PNPB lainnya	960.000	75.064.505	7.406
<b>Jumlah</b>	<b>960.000</b>	<b>75.064.505</b>	<b>7.406</b>

### D.2 Beban Pegawai

*Beban Pegawai  
Rp1.533.573.159,00*

Jumlah Beban Pegawai periode 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp1.533.573.159,00 dan Rp1.537.501.689,00. Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara. Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Rincian Beban Pegawai 31 Desember 2025 dan 2024

Uraian Jenis Beban	2025	2024	% Naik (Turun)
Beban Gaji Pokok PNS	476.363.000	525.170.200	-9,3
Beban Pembulatan Gaji PNS	5.720	7.482	-23,5
Beban Tunj. Suami/Istri PNS	36.829.280	41.841.790	-12,0
Beban Tunj. Anak PNS	12.979.506	15.032.084	-13,7
Beban Tunj. Struktural PNS	7.560.000	7.560.000	0,0
Beban Tunj. Fungsional PNS	27.440.000	34.720.000	-21,0
Beban Tunj. PPh PNS	2.673.322	2.913.394	-8,2
Beban Tunj Beras PNS	28.388.640	32.444.160	-12,5
Beban Uang Makan PNS	73.208.000	76.746.000	-4,6
Beban Tunj. Umum PNS	10.385.000	10.305.000	0,8
Beban Gaji Pokok PPPK	86.270.900	40.023.200	115,6
Beban Pembulatan Gaji PPPK	1.139	438	160,0
Beban Tunjangan Suami/Istri PPPK	7.666.010	4.002.320	91,5
Beban Tunjangan Anak PPPK	2.068.324	800.464	158,4
Beban Tunjangan Fungsional PPPK	5.040.000	5.040.000	0,0
Beban Tunjangan Beras PPPK	6.517.800	3.041.640	114,3
Beban Uang Makan PPPK	19.143.000	7.945.000	140,9
Beban Tunjangan Umum PPPK	2.760.000	0	
Beban Pegawai (Tunjangan Khusus / Kegiatan) PNS	621.367.885	680.173.627	-8,6
Beban Pegawai (Tunjangan Khusus / Kegiatan) PPPK	106.905.633	46.235.320	131,2
<b>Jumlah Belanja</b>	<b>1.533.573.159</b>	<b>1.537.501.689</b>	<b>-0,3</b>
Kekurangan Gaji Pegawai TA yg Lalu	0	0	0
<b>Jumlah Belanja Bersih</b>	<b>1.533.573.159</b>	<b>1.537.501.689</b>	<b>-0,3</b>

### D.3 Beban Persediaan

*Beban Persediaan  
Rp8.651.076,00*

Jumlah Beban Persediaan pada periode 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp8.651.076,00 dan Rp50.819.997,00. Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan. Terjadi penurunan belanja barang persediaan jika dibandingkan dengan belanja barang persediaan pada periode 31 Desember 2024.

<b>Uraian Jenis Beban</b>	<b>2025</b>	<b>2024</b>	<b>% Naik (Turun)</b>
Beban Persediaan Konsumsi	8.651.076	50.819.997	-83,0
Beban Persediaan Bahan Baku	0	0	0
Beban Persediaan Lainnya	0	0	0
<b>Jumlah Belanja</b>	<b>8.651.076</b>	<b>50.819.997</b>	<b>-83,0</b>

### D.4 Beban Barang dan Jasa

*Beban Barang dan  
Jasa  
Rp1.196.753.714,00*

Jumlah Beban Barang dan Jasa periode 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp1.196.753.714,00 dan Rp1.506.402.463,00. Beban Barang dan Jasa terdiri dari beban barang dan jasa berupa konsumsi atas barang dan/atau jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas serta beban lain-lain berupa beban yang timbul karena penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap.

Rincian Beban Barang dan Jasa Per 31 Desember 2025 dan 2024

<b>Uraian Jenis Beban</b>	<b>2025</b>	<b>2024</b>	<b>% Naik (Turun)</b>
Beban Keperluan Perkantoran	311.881.796	948.272.036	-67,1
Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	955.496	3.119.932	-69,4
Beban Honor Operasional Satuan Kerja	78.840.000	53.448.000	47,5
Beban Barang Operasional Lainnya	31.855.530	28.804.063	10,6
Beban Bahan	2.847.500	11.103.875	-74,4
Beban Peralatan dan Mesin - Ekstrakomptabel	17.165.150	8.079.608	112,5
Beban Langganan Listrik	87.734.172	128.347.544	-37,7
Beban Langganan Telepon	1.309.355	1.408.954	-13,9
Beban Langganan Air	1.887.875	1.873.500	-8,3
Beban Langganan Daya dan Jasa Lainnya	133.000.000	270.000.000	-50,7
Beban Sewa	3.996.000	5.994.000	-33,3
Beban Jasa Lainnya	525.270.840	45.950.951	1043,1
<b>Jumlah Belanja</b>	<b>1.196.753.714</b>	<b>1.506.402.463</b>	<b>-21,1</b>

## D.5 Beban Pemeliharaan

*Beban Pemeliharaan  
Rp987.437.392,00*

Beban Pemeliharaan per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing senilai Rp987.437.392,00 dan Rp1.258.813.906,00. Beban Pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal. Terjadi penurunan beban pemeliharaan jika dibandingkan dengan beban pemeliharaan pada periode Juni 2024. Rincian beban pemeliharaan untuk periode 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

### *Rincian Beban Pemeliharaan 30 Juni 2025 dan 2024*

<b>Uraian Jenis Beban</b>	<b>2025</b>	<b>2024</b>	<b>% Naik (Turun)</b>
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	780.375.045	940.867.000	-17,1
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	205.154.747	312.008.726	-34,2
Beban Pemeliharaan lainnya	1.907.600	5.944.180	-67,9
<b>Jumlah Belanja</b>	<b>987.437.392</b>	<b>1.258.813.906</b>	<b>-21,6</b>

## D.6 Beban Perjalanan Dinas

*Beban Perjalanan Dinas  
Rp31.445.614,00*

Beban Perjalanan Dinas Pemeliharaan per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp31.445.614,00 dan Rp149.102.187,00. Beban tersebut merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan. Terjadi penurunan beban perjalanan dinas jika dibandingkan dengan beban perjalanan dinas pada periode September 2024 hal ini disebabkan karena banyaknya kegiatan persiapan dalam rangka perubahan kelembagaan Loka Riset Perikanan Tuna ditahun 2024. Rincian Beban Perjalanan Dinas untuk periode 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

### *Rincian Beban Perjalanan Dinas 31 Desember 2025 dan 2024*

<b>Uraian Jenis Beban</b>	<b>2025</b>	<b>2024</b>	<b>% Naik (Turun)</b>
Beban Perjalanan Biasa	31.445.614	148.987.187	-78,9
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	0	115.000	-100,0
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota			
<b>Jumlah Belanja</b>	<b>31.445.614</b>	<b>149.102.187</b>	<b>-78,9</b>

## D.7 Beban Penyusutan dan Amortisasi

*Beban Penyusutan  
dan Amortisasi Rp  
1.017.989.514,00*

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp530.089.783,00 dan Rp920.245.534,00. Beban Penyusutan merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud. Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

*Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi  
Per 31 Desember 2025 dan 2024*

<b>Uraian Jenis Beban</b>	<b>2025</b>	<b>2024</b>	<b>% Naik (Turun)</b>
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	10.139.907.907	701.519.108	-41.0
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	2.394.272.984	209.893.196	-46.7
Beban Penyusutan Jaringan	110.415.381	8.833.230	-50.0
Beban Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasional Pemerintah	0	0	
<b>Jumlah Belanja</b>	<b>1.017.989.514</b>	<b>920.245.534</b>	<b>-42.4</b>

## D.8 Kegiatan Non Operasional

Surplus dari  
Kegiatan Non  
Operasional  
Rp6.200.000,00

Pos Surplus/Devisit dari Kegiatan Non Operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya *tidak* rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas. Surplus dari Kegiatan per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

### Rincian Kegiatan Non Operasional 31 Desember 2025 dan 2024

Uraian Jenis Beban	2025	2024	% Naik (Turun)
Surplus/Defisit Pelepasan Aset	6.200.000	(4.764.876)	230,1
Surplus/Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	
Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0	0	
<b>Jumlah Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional</b>	<b>6.200.000</b>	<b>(4.764.876)</b>	<b>230,1</b>

## D.9 Pos Luar Biasa

Pos Luar Biasa  
Rp0,00

Pos Luar Biasa terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak sering terjadi, tidak dapat diramalkan dan berada di luar kendali entitas. Pos Luar Biasa untuk per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing Rp0,00 dan Rp0,00.

## **E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS**

### **E.1 Ekuitas Awal**

*Ekuitas Awal  
Rp24.591.103.399,00*

Nilai ekuitas pada periode 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp24.591.103.399,00 dan Rp22.467.483.198,00.

### **E.2 Surplus (Defisit) LO**

*Defisit LO  
(Rp4.768.690.469,00)*

Jumlah Defisit LO untuk periode 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebesar (Rp4.768.690.469,00) dan (Rp5.352.592.147,00). Defisit LO merupakan selisih kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional, surplus/defisit kegiatan non operasional, dan pos luar biasa.

### **E.3 Koreksi yang Menambah / Mengurangi Ekuitas**

#### **E.3.1 Koreksi Atas Reklasifikasi**

*Koreksi Atas  
Reklasifikasi Rp0,00*

Koreksi atas reklasifikasi untuk periode 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Koreksi atas reklasifikasi mencerminkan koreksi atas nilai aset yang diakibatkan karena kesalahan dalam pencatatan yang terjadi pada periode sebelumnya.

#### **E.3.2 Selisih Revaluasi Aset Tetap**

*Selisih Revaluasi Aset  
Tetap Rp0,00*

Selisih Revaluasi Aset Tetap merupakan selisih yang muncul pada saat dilakukan penilaian ulang aset tetap. Selisih Revaluasi Aset Tetap periode 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00.

#### **E.3.3 Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi**

*Koreksi Nilai Aset  
Tetap Non Revaluasi  
Rp4.360.599,00*

Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi untuk periode 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebesar Rp4.360.599,00 dan (Rp3.223.500,00). Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi berasal dari koreksi reklasifikasi aset dan persenjataan sesuai NOTA DINAS Sekretaris Badan BPPSDMKP NOMOR 2873/BPPSDM.1/PL.760/IX/2025 Tanggal 23 September 2025 tentang Koreksi Kodefikasi dan Penggolongan BMN bidang Alat Persenjataan Pada Satker BPPSDM KP.

Transaksi Antar  
Entitas  
Rp3.762.779.645,00

#### E.4 Transaksi Antar Entitas

Nilai Transaksi Antar Entitas untuk periode 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp3.762.779.645,00 dan Rp7.479.435.848,00. Transaksi antar Entitas adalah transaksi yang melibatkan dua atau lebih entitas yang berbeda baik internal KL, antar KL, antar BUN maupun KL dengan BUN.

##### *Rincian Nilai Transaksi Antar Entitas*

Transaksi Antar Entitas	Nilai
Ditagihkan ke Entitas Lain	3.769.939.645
Diterima dari Entitas Lain	7.160.000
<b>Jumlah</b>	<b>3.762.779.645</b>

#### E.4.1 Diterima dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL)

Diterima dari Entitas Lain/Ditagihkan ke Entitas Lain merupakan transaksi antar entitas atas pendapatan dan belanja pada KL yang melibatkan kas negara (BUN). Pada periode 31 Desember 2025, DDEL sebesar Rp7.160.000,00 sedangkan DKEL sebesar (Rp3.769.939.645,00).

#### E.5 Ekuitas Akhir

Ekuitas Akhir  
Rp23.589.553.174,00

Nilai Ekuitas pada periode 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp23.589.553.174,00 dan Rp24.591.103.399,00.

## F. PENGUNGKAPAN-PENGUNGKAPAN LAINNYA

### F.1 KEJADIAN-KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL NERACA

Tidak ada catatan kejadian penting setelah tanggal neraca.

### F.2 TEMUAN DAN TINDAK LANJUT

-

#### F.2.2 TINDAK LANJUT TEMUAN BPK

-

### F.3 PENGUNGKAPAN LAIN LAIN

- LRPT Benoa pada tahun anggaran 2025 tidak terdapat Belanja yang masih harus dibayar (Akrua).
- Capaian Output Realisasi Kinerja Anggaran Loka Riset Perikanan Tuna per 31 Desember 2025 mencapai 98.49% pada realisasi belanja. Sedangkan realisasi output hingga bulan Desember 2025 sebesar 100% terhadap Dukungan Manajemen Internal Lingkup Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan. Rincian capaian terdapat pada lampiran Laporan Realisasi Kinerja.
- LRPT Benoa pada tahun 2025 telah menerapkan Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK) dengan 2 Akun signifikan, antara lain Akun : 111611 - Kas di Bendahara Pengeluaran dan 132111 - Peralatan dan Mesin.
- Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya senilai Rp7.160.000,00 berupa sewa Guest House senilai Rp960.000,00 dan Hasil Lelang senilai Rp6.200.000,00. Neraca ekstrakomptabel senilai Rp17.165.150,00.
- Berdasarkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 21/MEN-KP/KU.611/2023, tanggal 17 Juli 2023 tentang Perubahan Kelima Puluh Atas Keputusan Menteri Kelautan Dan Perikanan Nomor Kep.79/ Men/Ku.611/2019 Tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran Pada Satuan Kerja Kantor Daerah (Unit Pelaksana Teknis) Di Lingkungan Kementerian Kelautan Dan Perikanan menetapkan :  
Nama : Ni Nyoman Siti Mardiani Satria, S.Akt  
NIP : 19820903 200701 2 002  
Pangkat/Gol : Penata – III/c  
Jabatan : Kepala Loka Riset Perikanan Tuna  
Diangkat dalam jabatan Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Loka Riset Perikanan Tuna.

- Berdasarkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP-1/LRPT/KU.611/2025, tanggal 2 Januari 2025 tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen Dan Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar Pada Satuan Kerja Loka Riset Perikanan Tuna menetapkan :

Nama : Suciadi Catur Nugroho, S.Pi., M.Sc

NIP : 19860515 201403 1 001

Pangkat/Gol : Penata – III/c

Jabatan : Pengelola Monitoring dan Evaluasi

Diangkat dalam jabatan Pejabat Pembuat Komitmen Satuan Kerja Loka Riset Perikanan Tuna;

Nama : Noor Muhammad, S.Pi

NIP : 19790308 201406 1 003

Pangkat/Gol : Penata – III/c

Jabatan : Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Pertama

Diangkat dalam jabatan Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar Satuan Kerja Loka Riset Perikanan Tuna.

- Berdasarkan Keputusan Kepala Loka Riset Perikanan Tuna Nomor : KEP-2/LRPT/KU.110//2025, tanggal 2 Januari 2025 tentang Pengangkatan Bendahara Pengeluaran Pada Satuan Kerja Loka Riset Perikanan Tuna menetapkan :

Nama : Reli Febriani Lupitasari, BNT

NIP : 19840228 200811 2 001

Pangkat/Gol : Pengatur Tk.I – II/d

Jabatan : Pranata Keuangan APBN Terampil

diangkat dalam jabatan Bendahara Pengeluaran Satuan Kerja Loka Riset Perikanan Tuna.



**LAPORAN REALISASI ANGGARAN SATUAN KERJA  
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 - AUDITED  
(DALAM RUPIAH)**



**KEMENTERIAN/LEMBAGA** : KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN 032  
**ESELON I** : BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN PERIKANAN 12  
**SATUAN KERJA** : LOKA RISET PERIKANAN TUNA 403826

Tgl Data : 29/04/26 1:26 AM  
Tgl Cetak : 29/04/26 7:03 AM  
Halaman : 2  
lap\_lra\_face\_satker\_new\_poc

URAIAN	2025				2024			
	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%
1	2	4	5	6	7	8	9	10
2. Dana Alokasi Umum	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Dana Transfer Khusus	0	0	0	0	0	0	0	0
a. Dana Alokasi Khusus Fisik	0	0	0	0	0	0	0	0
b. Dana Alokasi Khusus Non Fisik	0	0	0	0	0	0	0	0
c. Hibah Kepada Daerah	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Dana Otonomi Khusus	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Dana Desa	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Insentif Fiskal	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Jumlah Belanja Negara (B.I + B.II)</b>	<b>3,827,716,000</b>	<b>3,769,939,645</b>	<b>(57,776,355)</b>	<b>98.49</b>	<b>7,718,752,000</b>	<b>7,557,800,353</b>	<b>(160,951,647)</b>	<b>97.91</b>
<b>C. PEMBIAYAAN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Keterangan :  
FINAL

Denpasar, 29 April 2026  
Penanggung Jawab UAKPA  
KPA Satuan Kerja



Ditandatangani  
Secara Elektronik

NI NYOMAN SITI MARDIANI SATRIA  
IIIc 198209032007012002

**NERACA**  
**TINGKAT SATUAN KERJA**  
**PER 31 DESEMBER 2025 - AUDITED**  
**(DALAM RUPIAH)**



**KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : ( 032 ) KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN**

**UNIT ORGANISASI : ( 12 ) BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN**

**WILAYAH/PROVINSI : ( 2200 ) BALI**

**SATUAN KERJA : ( 403826 ) LOKA RISET PERIKANAN TUNA**

Tgl Data : 29/04/26 1:26 AM

Tgl Cetak : 29/04/26 7:03 AM

Halaman : 1

lap\_neraca\_satker\_komparatif\_poc

NAMA PERKIRAAN	JUMLAH		Kenaikan (Penurunan)	
	2025	2024	Jumlah	%
1	2	3	4	5
<b>ASET</b>				
<b>ASET LANCAR</b>				
Persediaan	20,420,880	22,208,956	(1,788,076)	(8.05)
<b>JUMLAH ASET LANCAR</b>	<b>20,420,880</b>	<b>22,208,956</b>	<b>(1,788,076)</b>	<b>(8.05)</b>
<b>ASET TETAP</b>				
Tanah	13,175,070,000	13,175,070,000	0	0.00
Peralatan dan Mesin	11,902,022,520	12,256,950,589	(354,928,069)	(2.90)
Gedung dan Bangunan	10,879,717,054	10,879,717,054	0	0.00
Jalan, Irigasi dan Jaringan	264,996,920	264,996,920	0	0.00
AKUMULASI PENYUSUTAN	(12,644,596,272)	(11,985,895,426)	(658,700,846)	5.50
<b>JUMLAH ASET TETAP</b>	<b>23,577,210,222</b>	<b>24,590,839,137</b>	<b>(1,013,628,915)</b>	<b>(4.12)</b>
<b>JUMLAH ASET</b>	<b>23,597,631,102</b>	<b>24,613,048,093</b>	<b>(1,015,416,991)</b>	<b>(4.13)</b>
<b>KEWAJIBAN</b>				
<b>KEWAJIBAN JANGKA PENDEK</b>				
Utang kepada Pihak Ketiga	8,077,928	21,944,694	(13,866,766)	(63.19)
<b>JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK</b>	<b>8,077,928</b>	<b>21,944,694</b>	<b>(13,866,766)</b>	<b>(63.19)</b>
<b>JUMLAH KEWAJIBAN</b>	<b>8,077,928</b>	<b>21,944,694</b>	<b>(13,866,766)</b>	<b>(63.19)</b>
<b>EKUITAS</b>				
<b>EKUITAS</b>				
Ekuitas	23,589,553,174	24,591,103,399	(1,001,550,225)	(4.07)
<b>JUMLAH EKUITAS</b>	<b>23,589,553,174</b>	<b>24,591,103,399</b>	<b>(1,001,550,225)</b>	<b>(4.07)</b>
<b>JUMLAH EKUITAS</b>	<b>23,589,553,174</b>	<b>24,591,103,399</b>	<b>(1,001,550,225)</b>	<b>(4.07)</b>
<b>JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS</b>	<b>23,597,631,102</b>	<b>24,613,048,093</b>	<b>(1,015,416,991)</b>	<b>(4.13)</b>

Keterangan :

FINAL

Denpasar, 29 April 2026  
Penanggung Jawab UAKPA  
KPA Satuan Kerja



Ditandatangani  
Secara Elektronik

NI NYOMAN SITI MARDIANI SATRIA

IIIc 198209032007012002

## NERACA PERCOBAAN (BASIS AKRUAL)

TINGKAT SATUAN KERJA  
PER 31 DESEMBER 2025 - AUDITED  
(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : ( 032 ) KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

UNIT ORGANISASI : ( 12 ) BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN

WILAYAH/PROVINSI : ( 2200 ) BALI

SATUAN KERJA : ( 403826 ) LOKA RISET PERIKANAN TUNA

Tgl Data : 29/04/26 1:26 AM

Tgl Cetak : 29/04/26 7:04 AM

Halaman : 1

lap\_neraca\_percobaan\_akrual\_satker\_poc

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
0.0	117111	Barang Konsumsi	20,420,880	0
0.0	131111	Tanah	13,175,070,000	0
0.0	132111	Peralatan dan Mesin	11,902,022,520	0
0.0	133111	Gedung dan Bangunan	10,879,717,054	0
0.0	134113	Jaringan	264,996,920	0
0.0	137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	0	10,139,907,907
0.0	137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	0	2,394,272,984
0.0	137313	Akumulasi Penyusutan Jaringan	0	110,415,381
0.0	212112	Belanja barang yang masih harus dibayar	0	8,077,928
0.0	313111	Ditagihkan ke Entitas Lain	0	3,769,939,645
0.0	313121	Diterima dari Entitas Lain	7,160,000	0
0.0	391111	Ekuitas	0	24,591,103,399
0.0	391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	0	4,360,599
3.0	425122	Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	0	6,200,000
3.0	425131	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	0	960,000
3.0	511111	Beban Gaji Pokok PNS	476,363,000	0
3.0	511119	Beban Pembulatan Gaji PNS	5,720	0
3.0	511121	Beban Tunj. Suami/Istri PNS	36,829,280	0
3.0	511122	Beban Tunj. Anak PNS	12,979,506	0
3.0	511123	Beban Tunj. Struktural PNS	7,560,000	0
3.0	511124	Beban Tunj. Fungsional PNS	27,440,000	0
3.0	511125	Beban Tunj. PPh PNS	2,673,322	0
3.0	511126	Beban Tunj. Beras PNS	28,388,640	0
3.0	511129	Beban Uang Makan PNS	73,208,000	0
3.0	511151	Beban Tunjangan Umum PNS	10,385,000	0
3.0	511611	Beban Gaji Pokok PPPK	86,270,900	0
3.0	511619	Beban Pembulatan Gaji PPPK	1,139	0
3.0	511621	Beban Tunjangan Suami/Istri PPPK	7,666,010	0
3.0	511622	Beban Tunjangan Anak PPPK	2,068,324	0
3.0	511624	Beban Tunjangan Fungsional PPPK	5,040,000	0
3.0	511625	Beban Tunjangan Beras PPPK	6,517,800	0
3.0	511628	Beban Uang Makan PPPK	19,143,000	0
3.0	511633	Beban Tunjangan Umum PPPK	2,760,000	0
3.0	512411	Beban Pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja)	621,367,885	0
3.0	512414	Beban Pegawai Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja PPPK	106,905,633	0
3.0	521111	Beban Keperluan Perkantoran	311,881,796	0
3.0	521114	Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	955,496	0
3.0	521115	Beban Honor Operasional Satuan Kerja	78,840,000	0

## NERACA PERCOBAAN (BASIS AKRUAL)

TINGKAT SATUAN KERJA  
PER 31 DESEMBER 2025 - AUDITED  
(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : ( 032 ) KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

UNIT ORGANISASI : ( 12 ) BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN

WILAYAH/PROVINSI : ( 2200 ) BALI

SATUAN KERJA : ( 403826 ) LOKA RISET PERIKANAN TUNA

Tgl Data : 29/04/26 1:26 AM

Tgl Cetak : 29/04/26 7:04 AM

Halaman : 2

lap\_neraca\_percobaan\_akrual\_satker\_poc

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBIT	KREDIT
1	2	3	4	5
3.0	521119	Beban Barang Operasional Lainnya	31,855,530	0
3.0	521211	Beban Bahan	2,847,500	0
3.0	521252	Beban Peralatan dan Mesin - Ekstrakomptabel	17,165,150	0
3.0	522111	Beban Langganan Listrik	87,734,172	0
3.0	522112	Beban Langganan Telepon	1,319,355	0
3.0	522113	Beban Langganan Air	1,887,875	0
3.0	522119	Beban Langganan Daya dan Jasa Lainnya	133,000,000	0
3.0	522141	Beban Sewa	3,996,000	0
3.0	522191	Beban Jasa Lainnya	525,270,840	0
3.0	523111	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	780,375,045	0
3.0	523121	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	205,154,747	0
3.0	523199	Beban Pemeliharaan Lainnya	1,907,600	0
3.0	524111	Beban Perjalanan Dinas Biasa	31,445,614	0
3.0	591111	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	785,464,082	0
3.0	591211	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	223,692,202	0
3.0	591313	Beban Penyusutan Jaringan	8,833,230	0
3.0	593111	Beban Persediaan konsumsi	8,651,076	0
<b>JUMLAH</b>			<b>41,025,237,843</b>	<b>41,025,237,843</b>

Keterangan :

FINAL

Denpasar, 29 April 2026  
Penanggung Jawab UAKPA  
KPA Satuan KerjaDitandatangani  
Secara ElektronikNI NYOMAN SITI MARDIANI SATRIA  
IIIc 198209032007012002

## NERACA PERCOBAAN (BASIS KAS)

TINGKAT SATUAN KERJA  
PER 31 DESEMBER 2025 - AUDITED  
(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : ( 032 ) KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

UNIT ORGANISASI : ( 12 ) BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN

WILAYAH/PROVINSI : ( 2200 ) BALI

SATUAN KERJA : ( 403826 ) LOKA RISET PERIKANAN TUNA

Tgl Data : 29/04/26 12:36 AM

Tgl Cetak : 29/04/26 7:04 AM

Halaman : 1

lap\_neraca\_percobaan\_kas\_satker\_poc

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBIT	KREDIT
1	2	3	4	5
0.0	313111	DITAGIHKAN KE ENTITAS LAIN	0	3,769,939,645
0.0	313121	DITERIMA DARI ENTITAS LAIN	7,160,000	0
3.0	425122	Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	0	6,200,000
3.0	425131	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	0	960,000
3.0	511111	Belanja Gaji Pokok PNS	476,363,000	0
3.0	511119	Belanja Pembulatan Gaji PNS	5,850	0
3.0	511121	Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	36,829,280	0
3.0	511122	Belanja Tunj. Anak PNS	12,979,506	0
3.0	511123	Belanja Tunj. Struktural PNS	7,560,000	0
3.0	511124	Belanja Tunj. Fungsional PNS	27,440,000	0
3.0	511125	Belanja Tunj. PPh PNS	2,673,322	0
3.0	511126	Belanja Tunj. Beras PNS	28,388,640	0
3.0	511129	Belanja Uang Makan PNS	73,208,000	0
3.0	511151	Belanja Tunjangan Umum PNS	10,385,000	0
3.0	511611	Belanja Gaji Pokok PPPK	86,270,900	0
3.0	511619	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	1,139	0
3.0	511621	Belanja Tunjangan Suami/Istri PPPK	7,666,010	0
3.0	511622	Belanja Tunjangan Anak PPPK	2,068,324	0
3.0	511624	Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	5,040,000	0
3.0	511625	Belanja Tunjangan Beras PPPK	6,517,800	0
3.0	511628	Belanja Uang Makan PPPK	19,143,000	0
3.0	511633	Belanja Tunjangan Umum PPPK	2,760,000	0
3.0	512411	Belanja Pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja)	621,367,885	0
3.0	512414	Belanja Pegawai Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja PPPK	110,416,033	0
3.0	521111	Belanja Keperluan Perkantoran	311,881,796	0
3.0	521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	955,496	0
3.0	521115	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	78,840,000	0
3.0	521119	Belanja Barang Operasional Lainnya	31,855,530	0
3.0	521211	Belanja Bahan	2,847,500	0
3.0	521252	Belanja Peralatan dan Mesin - Ekstrakomptabel	17,165,150	0
3.0	521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	6,863,000	0
3.0	522111	Belanja Langganan Listrik	98,101,305	0
3.0	522112	Belanja Langganan Telepon	1,322,963	0
3.0	522113	Belanja Langganan Air	1,873,500	0
3.0	522119	Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya	133,000,000	0
3.0	522141	Belanja Sewa	3,996,000	0
3.0	522191	Belanja Jasa Lainnya	525,270,840	0
3.0	523111	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	780,375,045	0

NERACA PERCOBAAN (BASIS KAS)

TINGKAT SATUAN KERJA  
PER 31 DESEMBER 2025 - AUDITED  
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : ( 032 ) KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

UNIT ORGANISASI : ( 12 ) BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN

WILAYAH/PROVINSI : ( 2200 ) BALI

SATUAN KERJA : ( 403826 ) LOKA RISET PERIKANAN TUNA

Tgl Data : 29/04/26 12:36 AM

Tgl Cetak : 29/04/26 7:04 AM

Halaman : 2

lap\_neraca\_percobaan\_kas\_satker\_poc

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBIT	KREDIT
1	2	3	4	5
3.0	523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	205,154,747	0
3.0	523199	Belanja Pemeliharaan Lainnya	1,907,600	0
3.0	524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	31,445,614	0
3.1	511119	Pengembalian Belanja Pembulatan Gaji PNS	0	130
<b>JUMLAH</b>			<b>3,777,099,775</b>	<b>3,777,099,775</b>

Keterangan :

FINAL

Denpasar, 29 April 2026  
Penanggung Jawab UAKPA  
KPA Satuan Kerja



Ditandatangani  
Secara Elektronik

NI NYOMAN SITI MARDIANI SATRIA  
198209032007012002

**LAPORAN OPERASIONAL**  
**TINGKAT SATUAN KERJA**  
**PER 31 DESEMBER 2025 - AUDITED**  
(DALAM RUPIAH)



**KEMENTERIAN/LEMBAGA** : ( 032 ) KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN  
**ESELON I** : ( 12 ) BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN  
**WILAYAH/PROVINSI** : ( 2200 ) BALI  
**SATUAN KERJA** : ( 403826 ) LOKA RISET PERIKANAN TUNA

Tgl Data : 29/04/26 1:26 AM

Tgl Cetak : 29/04/26 7:00 AM

Halaman : 1

lap\_lo\_satker\_poc

URAIAN	2025	2024	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
KEGIATAN OPERASIONAL	0	0	0	
PENDAPATAN OPERASIONAL	0	0	0	
PENDAPATAN PERPAJAKAN	0	0	0	
Pendapatan Pajak Penghasilan	0	0	0	
Pendapatan Pajak Pertambahan Nilai dan Penjualan Barang Mewah	0	0	0	
Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan	0	0	0	
Pendapatan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	0	0	0	
Pendapatan Cukai	0	0	0	
Pendapatan Pajak Lainnya	0	0	0	
Pendapatan Bea Masuk	0	0	0	
Pendapatan Bea Keluar	0	0	0	
Jumlah Pendapatan Perpajakan	0	0	0	
PENDAPATAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	0	0	0	
Pendapatan Sumber Daya Alam	0	0	0	
Pendapatan dari Kekayaan Negara dipisahkan (KND)	0	0	0	
Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya	960,000	75,064,505	(74,104,505)	(98.721)
Pendapatan Badan Layanan Umum	0	0	0	
Jumlah Pendapatan Negara Bukan Pajak	960,000	75,064,505	(74,104,505)	(98.721)
PENDAPATAN HIBAH	0	0	0	
Pendapatan Hibah	0	0	0	
Jumlah Pendapatan Hibah	0	0	0	
Jumlah Pendapatan	960,000	75,064,505	(74,104,505)	(98.721)
BEBAN OPERASIONAL	0	0	0	
Beban Pegawai	1,533,573,159	1,537,501,689	(3,928,530)	(0.256)
Beban Persediaan	8,651,076	50,819,997	(42,168,921)	(82.977)
Beban Barang dan Jasa	1,196,753,714	1,506,402,463	(309,648,749)	(20.556)
Beban Pemeliharaan	987,437,392	1,258,819,906	(271,382,514)	(21.558)
Beban Perjalanan Dinas	31,445,614	149,102,187	(117,656,573)	(78.91)
Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda	0	0	0	

**LAPORAN OPERASIONAL**  
**TINGKAT SATUAN KERJA**  
**PER 31 DESEMBER 2025 - AUDITED**  
(DALAM RUPIAH)



**KEMENTERIAN/LEMBAGA** : ( 032 ) KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN  
**ESELON I** : ( 12 ) BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN  
**WILAYAH/PROVINSI** : ( 2200 ) BALI  
**SATUAN KERJA** : ( 403826 ) LOKA RISET PERIKANAN TUNA

Tgl Data : 29/04/26 1:26 AM

Tgl Cetak : 29/04/26 7:00 AM

Halaman : 2

lap\_lo\_satker\_poc

URAIAN	2025	2024	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
Beban Pembayaran Bunga Utang	0	0	0	
Beban Subsidi	0	0	0	
Beban Hibah	0	0	0	
Beban Bantuan Sosial	0	0	0	
Beban Penyusutan dan Amortisasi	1,017,989,514	920,245,534	97,743,980	10.622
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	0	0	0	
Beban Transfer ke Daerah	0	0	0	
Beban Lain-Lain	0	0	0	
<b>JUMLAH BEBAN</b>	<b>4,775,850,469</b>	<b>5,422,891,776</b>	<b>(647,041,307)</b>	<b>(11.932)</b>
<b>SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN OPERASIONAL</b>	<b>(4,774,890,469)</b>	<b>(5,347,827,271)</b>	<b>572,936,802</b>	<b>(10.713)</b>
<b>KEGIATAN NON OPERASIONAL</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Surplus/Defisit Pelepasan Aset	6,200,000	(4,764,876)	10,964,876	(230.119)
Pendapatan Pelepasan Aset	6,200,000	3,300,000	2,900,000	87.879
Beban Pelepasan Aset	0	8,064,876	(8,064,876)	(100)
Surplus/Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Pendapatan Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Beban Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0	0	0	
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0	0	0	
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0	0	0	
<b>JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL</b>	<b>6,200,000</b>	<b>(4,764,876)</b>	<b>10,964,876</b>	<b>(230.119)</b>
<b>SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA</b>	<b>(4,768,690,469)</b>	<b>(5,352,592,147)</b>	<b>583,901,678</b>	<b>(10.909)</b>
<b>POS LUAR BIASA</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Beban Luar Biasa	0	0	0	
<b>POS LUAR BIASA</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>SURPLUS/DEFISIT - LO</b>	<b>(4,768,690,469)</b>	<b>(5,352,592,147)</b>	<b>583,901,678</b>	<b>(10.909)</b>

Keterangan :

FINAL

Denpasar, 29 April 2026  
Penanggung Jawab UAKPA  
KPA Satuan Kerja



Ditandatangani  
Secara Elektronik

NI NYOMAN SITI MARDIANI SATRIA  
IIIc 198209032007012002

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS  
TINGKAT SATUAN KERJA  
PER 31 DESEMBER 2025 - AUDITED  
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : ( 032 ) KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

UNIT ORGANISASI : ( 12 ) BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN

WILAYAH/PROVINSI : ( 2200 ) BALI

SATUAN KERJA : ( 403826 ) LOKA RISET PERIKANAN TUNA

Tgl Data : 29/04/26 12:36 AM

Tgl Cetak : 29/04/26 7:03 AM

Halaman : 1

lap\_lpe\_satker\_poc

URAIAN	2025	2024	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
EKUITAS AWAL	24,591,103,399	22,467,483,198	2,123,620,201	9.45
SURPLUS/DEFISIT-LO	(4,768,690,469)	(5,352,592,147)	583,901,678	(10.91)
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS	4,360,599	(3,223,500)	7,584,099	(235.28)
KOREKSI ATAS REKLASIFIKASI	0	0	0	0
SELISIH REVALUASI ASET	0	0	0	0
KOREKSI NILAI ASET NON REVALUASI	4,360,599	(3,223,500)	7,584,099	(235.28)
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	3,762,779,645	7,479,435,848	(3,716,656,203)	(49.69)
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS	(1,001,550,225)	2,123,620,201	(3,125,170,426)	(147.16)
EKUITAS AKHIR	23,589,553,174	24,591,103,399	(1,001,550,225)	(4.07)

Keterangan :

FINAL

Denpasar, 29 April 2026  
Penanggung Jawab UAKPA  
KPA Satuan Kerja



Ditandatangani  
Secara Elektronik

NI NYOMAN SITI MARDIANI SATRIA  
Ilic 198209032007012002